



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDU TAUHID
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 651485

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.482.696.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 357.632.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 438.834.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m²/421 m² di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 406.096.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 711 m²/711 m² di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 280.134.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 846.293.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E250CGI AVANTGARDE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 237.500.000
2. MOBIL, FORTUNER FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 608.793.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 80.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.426.620.758****F. HARTA LAINNYA****Rp. 6.745.558.449****Sub Total****Rp. 10.581.168.207****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 10.581.168.207**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.